



Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Erna Elfriza Sibarani, Usman Tarigan*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Februari 2013; Disetujui April 2013; Dipublikasikan Juni 2013

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam mendistribusikan dana bantuan operasional sekolah di SDN. 320 Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa data kualitatif. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek peneliti secara holistik atau menyeluruh. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, , sedangkan yang menjadi informan utama yakni guru dan komite sekolah sebanyak 16 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kepala sekolah dalam pendistribusian dana BOS di SDN. 320 Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dalam kategori baik sekali. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan kepala sekolah dalam pendistribusian dana BOS yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam buku panduan BOS oleh pemerintah dan pengelolaan dana BOS. Hal ini tersebut diidentifikasi dari beberapa dimensi yaitu dari mekanisme penyaluran dana BOS, mekanisme pengambilan dana BOS dan mekanisme penggunaan dana BOS.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Sekolah; Kebijakan Publik

Abstract

This study aimed to find out how the principal's policy in distributing school operational grants at SDN. 320 Sinunukan Mandailing Natal District. This research method is descriptive research with qualitative data analysis. This study intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects holistically or thoroughly. Key informants in this study were principal, while the main informants were teachers and school committee as many as 16 people. Based on the results of the research shows that the principal's policy in the distribution of BOS funds in SDN. 320 Sinunukan Mandailing Natal Regency in excellent category. This can be seen from the principal's policy of distributing BOS funds conducted in accordance with regulations set out in the BOS manual by the government and the management of identifiable BOS funds from several dimensions of BOS funding mechanism, BOS fund raising mechanism and fund use mechanism.

Keywords: School Operational Assistance, Public Policy and Public Policy

How to Cite: Erna Elfriza Sibarani dan Usman Tarigan (2013). Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1 (1): 6-10

*Corresponding author:

E-mail: Usmantarigan@yahoo.com

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS. Dana BOS merupakan dana bantuan pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya program "Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Berkaitan dengan ini, secara khusus seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar Negeri maupun sekolah swasta bebas dari beban biaya operasional sekolah. Yaitu seluruh siswa di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang dibebaskan dari biaya operasional sekolah, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari

perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 antara lain: 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. (<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>).

Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS, dan mengenai ketidakefektifan pengelolaan dana BOS oleh pemerintah.

Dalam hal pengelolaan dana BOS sekolah belum menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi, sehingga setiap bagian yang memerlukan informasi tidak bisa dengan cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan, karena pemerosesan data masih bersifat manual., baik itu data siswa yang mendapat dana BO, data penggunaan dana BOS untuk pos-pos pengeluaran atau perbelanjaan rutin dan data-data lain yang dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya jumlah informan

(*key informan*). Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari informan lainnya. Disini yang ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2006 : 58). Lokasi Penelitian ini dilakukan di SDN. 320 Sinunukan 1 kecamatan Sinunukan 1. Salah satu pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut adalah dikarenakan adanya kegiatan

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data.

Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan: (1) observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti, (2) wawancara mendalam (*indepth interview*). dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif, (3) dokumentasi. studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian.

Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan *key informan* (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006 : 98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap *key informan*. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari informan. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis

secara kualitatif, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Oleh karena itu, data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara cermat guna mendapatkan kesimpulan yang penulis harapkan dapat dijadikan kontribusi penelitian ini.

Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156): (1) Reduksi Data, Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas, (2) Penyajian Data, Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik, (3) Verifikasi, Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN. 320 Sinunukan I Kecamatan Sinunukan. Harapan yang ingin diwujudkan dalam analisis ini adalah mengetahui apakah implementasi kebijakan program BOS di SD Negeri 320 Sinunukan memiliki kesesuaian dengan mekanisme penyaluran dana secara bertahap dengan ketentuan: (1) Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan, (2) Dana BOS disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan, (3) Khusus penyaluran dana Juli-September, apabila data jumlah siswa setiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan pada periode April-Juni.

Kesesuaian pelaksanaan pendistribusian dana BOS dimulai dengan pengusulan dana BOS oleh Kepala Sekolah. Pengusulan dan pencairan dana BOS di Kecamatan Sinunukan dimulai dengan pengusulan dana dengan dilampiri daftar dan jumlah siswa kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten melalui komisariat. Berdasarkan data usulan tersebut, Tim Manajemen Kabupaten menerbitkan SPPB dengan mencantumkan jumlah dana BOS yang diterima sekolah pada satu periode penyaluran. SPPB didistribusikan ke sekolah-sekolah melalui komisariat.

Selanjutnya, sekolah menandatangani SPPB tersebut dan menyerahkan kembali ke komisariat dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS untuk periode sebelumnya. Kemudian komisariat mengirim kembali SPPB yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan dilampiri SPJ penggunaan dana periode sebelumnya ke Tim Manajemen BOS Kabupaten. Setelah itu Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani SPPB dan mendistribusikan ke sekolah sebagai syarat pencairan dana. Dengan SPPB tersebut sekolah mencairkan dana di Kantor. Dalam panduan BOS 2009 dinyatakan bahwa

komunikasi antara sekolah dan Tim Manajemen BOS kabupaten dilakukan secara langsung. Pelibatan komisariat dalam mekanisme ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah komisariat dipandang dapat membantu Tim Kabupaten dalam mengumpulkan pelaporan (setiap 3 bulan) dari sekolah. Dengan pemusatan di komisariat kabupaten merasa lebih mudah melakukan kontrol terhadap kewajiban sekolah. Sisi negatifnya adalah mekanisme ini sebenarnya menambah jalur birokrasi, yang mungkin saja rentan dengan penyimpangan. Bisa dibayangkan seandainya petugas di komisariat berperilaku tidak amanah terhadap sekolah-sekolah anggota komisariat. Kesesuaian lainnya adalah pengaturan pencairan dana oleh sekolah yang dilakukan setiap bulan yang merupakan sebuah ketentuan teknis operasional.

Pendistribusian dana BOS oleh sekolah-sekolah untuk memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari pusat belum mencukupi. Penggunaan dana BOS meliputi pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer yang besarnya mencapai sekitar 25%-30% dari seluruh dana BOS yang diterima, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, dan kegiatan ekstra kurikuler, pembelian barang-barang habis pakai, pembiayaan langganan daya dan jasa, pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan MKKS, pembiayaan pengelolaan BOS. Ketiga, dana BOS untuk buku yang digunakan oleh sekolah membeli buku sesuai dengan daftar sebagaimana yang direkomendasikan dan jumlah yang dibeli sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam panduan keterlibatan komite misalnya pada saat proses pencairan dana, pembelajaran dana, dsb. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan komite sangat baik dan terlihat Ketiga, ketentuan transparansi dalam panduan BOS menyatakan bahwa SDN. 320 Sinunukan mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh

dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah. Kepala sekolah juga harus mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite. Selain itu, Kepala Sekolah harus mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah di papan pengumuman setiap tiga bulan.

Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa kesesuaian ini disebabkan oleh faktor Standar Operating Procedure (SOP) yang sudah tepat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya kesesuaian ini adalah karena alasan sumber daya, yaitu tersedianya pengelola (staf) baik jumlah maupun keterampilan yang dimilikinya. Para pembuat kebijakan merasa yakin bahwa tugas penerbitan SK ini akan dilaksanakan oleh sekolah karena hal tersebut sudah cukup jelas disebutkan dalam panduan. Dalam praktik kebijakan kepala sekolah dalam pendistribusian dana BOS diketahui bahwa panduan saja tidak cukup menjamin sekolah akan melaksanakan perintah-perintah yang diharapkan. Sekolah perlu diarahkan dan dimonitor dalam setiap tahapan yang harus dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam gambaran implementasi pada sub bab Persiapan, pembentukan

KESIMPULAN

Dari hasil data dan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan kepala sekolah SDN. 320 Sinunukan menunjukkan kategori baik dimana kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam mendistribusikan dana BOS telah dilaksanakan dengan baik artinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman Penggunaan Dana dan kepala sekolah juga melakukan sesuai dengan peran yang diembannya yaitu sebagai pendidik, pengelola, administrator, penyelia,

pemimpin, pembaharu dan penggerak. Pengelolaan dana BOS di SDN. 320 Sinunukan menunjukkan pada kategori baik. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa hal yaitu dari mekanisme alokasi dana BOS, mekanisme penyaluran dana BOS, mekanisme pengambilan dana BOS dan mekanisme penggunaan dana BOS serta pertanggungjawaban sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (1997). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Joseph C. Rost. (2004). Kepemimpinan. Jogjakarta: Graha ilmu
- Kartini, Kartono, 2008. Pemimpin dan kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Press
- Hariandja, M. 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Hasibuan, Malayu. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan . Ketujuh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hasibuan. Malayu S.P. 2001. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M.2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Gramedia
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Stratejik Edisi keenam. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
- Sugiyono, Prof. Dr. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.